ISU STRATEGIS

BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH

POHON KINERJA

III. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

MENINGKATNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN KONDISI LINGKUNGAN

MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR

IV. MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN RESPONSIF

TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN PROFESIONAL

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN

MENINGKATNYA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN PARTISIPATIF

1. Indeks PEMDI
2. Indeks SPBE

MENINGKATNYA LAYANAN BERBASIS TEKBOLOGI INFORMASI

Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Digital

TERWUJUDNYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA MUDAH DI AKSES DAN FAKTUAL

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Terselenggaranya Pengelolaan Aplikasi Informatika

Persentase Aplikasi Yang Aktif dan Terkelola Sesuai Ketentuan SPBE Dari Total Aplikasi Yang Di Miliki

Terpenuhinya Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Daerah

Persentase Aplikasi Khusus Daerah Yang Di bangun dan Di kembangkan

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi, efisien, dan andal melalui pemanfaatan jaringan intra yang aman

IK : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Meningkatnya integrasi dan kualitas pelayanan publik digital pemerintah daerah melalui pemanfaatan portal pelayanan terintegrasi

IK : Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

IK Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

Meningkatnya integrasi, efisiensi, dan kualitas layanan pemerintahan daerah melalui pembangunan aplikasi khusus yang sesuai arsitektur SPBE dan pemanfaatan aplikasi umum SPBE

IK : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE

Meningkatnya efektivitas, integrasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan pusat kendali

IK : Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali

Meningkatnya integrasi dan kualitas layanan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan sistem penghubung layanan untuk interoperabilitas data dan layanan

IK : Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses Internet yang disediakan oleh Dinas

Meningkatnya keterhubungan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan dan informasi publik.

IK : Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas

Meningkatnya efektivitas, integrasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan pusat kendali

IK : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik melalui pengelolaan data dan informasi yang terpadu, valid, dan akuntabel.

IK : Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah

Terselenggaranya Tata Kelola Keamanan Informasi yang Sesuai dengan Kebijakan Nasional dan Standar BSSN

INDEKS KAMI (SKOR)

Terbangunnya Sistem Komunikasi Pemerintahan yang Aman dan Terkendali

Persentase Dokumen atau Data Penting Pemerintah Daerah Yang Di Enkripsi

Meningkatnya keamanan, keandalan, dan kepercayaan terhadap tata kelola informasi pemerintah daerah melalui kebijakan keamanan informasi dan persandian

IK : umlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian

Meningkatnya keandalan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian yang aman, terpadu, dan terpercaya.

IK : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian

Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terstandar

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terstandar, dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Persentase Data Sektoral Yang di kumpulkan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan tata kelola pembangunan daerah melalui penyediaan statistik sektoral yang valid, terpadu, dan akuntabel

IK : Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. IK

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia yang terpadu, valid, dan akuntabel

IK : Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Terhadap Keterbukaan Informasi

IKM terhadap penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase Pengelolaan Media Informasi Dan Komunikasi Publik yang aktif terkelola

Terciptanya Hubungan Yang Baik Dalam Membangun Citra Positif, Peningkatan Reputasi Serta Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah

IK : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. teverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media

Peningkatan Akses Dalam Penyebaran Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Untuk Bisa Diterima Dengan Mudah

IK : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo

peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan

IK : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan

memastikan kebijakan yang dibuat dan diterapkan relevan, efektif dan akuntabel

IK : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah

Meningkatnya Jangkauan dan Keterlibatan Publik terhadap Informasi Pemerintah

IK : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis

Tersedianya Konten Informasi Pemerintah yang Informatif, Menarik, dan Mudah Dipahami

IK : Jumlah Konten Informasi Publik

Terciptanya SDM yang Responsif terhadap Isu dan Dinamika Publik

IK : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan